

Tinjauan yuridis kedudukan PT PLN (persero) antara pengembian public service obligation dan sebagai perusahaan perseroan terbatas terkait tarif dasar listrik dari aspek hukum perusahaan = Judicial review of public service obligation implemented by PT PLN (persero) and as limited liability company related to basic electricity tariff from corporate law side

Juliansyah Rizal, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20423030&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang sebenarnya tentang bagaimana kedudukan PT PLN (Persero) dalam menjalankan kegiatan usaha ketenagalistrikan antara sebagai pengembang Public Service Obligation dan sebagai Perusahaan Perseroan Terbatas terkait tarif dasar listrik yang ditinjau dari Hukum Perusahaan serta mengetahui peraturan yang berlaku apa saja yang berkaitan dengan penugasan tersebut. Dengan beberapa permasalahan yaitu bagaimana kedudukan secara teoritis PT PLN (Persero) antara sebagai Public Service Obligation dan sekaligus sebagai Perseroan Terbatas terkait Tarif Dasar Listrik ditinjau dari Hukum Perusahaan dan bagaimana pengaturan Public Service Obligation bagi perusahaan Perseroan PT PLN (Persero) dan kedudukannya sebagai Perseroan Terbatas. Untuk menganalisisnya penulis melakukan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui kepustakaan.

Dapat dipahami bahwa selain tunduk pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 sebagai perusahaan perseroan yang mengejar keuntungan, PT PLN (Persero) juga tak dapat menampilkan pelaksanaan Penugasan Khusus/Public Service Obligation (PSO) yang diberikan oleh Pemerintah, meskipun Pelaksanaan PSO menimbulkan beberapa kelemahan yang menyebabkan adanya kerugian bagi PT PLN (Persero) seperti selisih defisit antara Biaya Pokok Penjualan (BPP) listrik dengan harga jualnya.

Untuk menyempurnakan Penugasan Khusus/Public Service Obligation (PSO) dari Pemerintah maka PT PLN (Persero) dapat melakukan Efisiensi dan Restrukturisasi Tarif dan Organisasi. Untuk mengantisipasi terhadap implikasi dari pelaksanaan penugasan (PSO). Begitupun juga diperlukan adanya Standar Operational Procedure (SOP) terhadap Penugasan Khusus/Public Service Obligation (PSO) yang dapat membuat pelaksanaannya efek.

<hr><i>ABSTRACT</i>

This research objective is to provide a real understanding of how the position of PT PLN (Persero) in running business activities as a developer of electricity between public service obligation and as a Limited Liability Company in the basic electricity tariff in terms of Corporate Law and to know what regulations relating to the assignment. With some problems, namely how the theoretical position of PT PLN (Persero) between a Public Service Obligation as well as a Limited Liability Company in the determination of the basic electricity tariff in terms of Corporate Law and how the public service obligation arrangements for the Company PT PLN (Persero) and its position as a Limited Liability Company. To analyze authors conducted

a normative juridical method that legal research is done through literature .

It is understood that the addition is subject to the provisions of Article 2 of Government Regulation Number 23 of 1994 as a limited liability company which is the pursuit of profit , PT PLN (Persero) also can not be exclude implementation of the Special Assignment / Public Service Obligation (PSO) provided by the Government , although the implementation of PSO raises some weaknesses that lead to losses for PT PLN (Persero) as the difference between the deficit Cost of Goods Sold (BPP) of electricity to the selling price.

To refine Special Assignment / Public Service Obligation (PSO) of the Government than PT PLN (Persero) can do Efficiency and Restructuring Rates and Organizations to anticipate the implications of the implementation of the assignment (PSO).Likewise also necessary to create Standard Operational Procedure (SOP) of the Special Assignment / Public Service Obligation (PSO) which can make effective implementation.</i>